

Indonesia 'Dihantui' Badai PHK

Dari Halaman 1

Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang dinilai mencekik industri lokal. "Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (6/4). Menurutnya, perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel membuat harga energi global melonjak hingga berdampak langsung pada biaya produksi. Adapun harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat industri mengikuti harga pasar global meski pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi.

FH Unmul Tolak Peradilan Militer

Dari Halaman 1

Dewan Perwakilan Mahasiswa FH, Lembaga Kajian Ilmiah dan Studi Hukum FH, Lembaga Dakwah Fakultas Al-Mizan, Asian Law Studies Association Local Chapter Unmul, dan Persekutuan Mahasiswa Kristen FH Unmul. "Kami menyatakan bahwa keadilan harus segera ditegakkan, keadilan harga mati. Ungkap dalang intelektual dan aktor yang merencanakan serta terlibat dalam kasus penyiraman air keras ini. Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus harus diadili dengan mekanisme peradilan umum," demikian isi petisi dikutip Senin (6/4). Mereka memandang penyiraman air keras terhadap Andrie memiliki niat dan tujuan untuk

Said mengungkapkan, perusahaan telah memberikan sinyal PHK kepada serikat pekerja di tingkat pabrik. Jika biaya energi tak terkendali, maka pengurangan karyawan bisa menjadi pilihan yang diambil perusahaan. "Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi," jelasnya. Lebih lanjut, ia juga menyinggung pengadaan impor 160 ribu mobil pikap dalam program Kopdes Merah Putih. Menurutnya, pengadaan impor tersebut dapat menyerap

melumpuhkan fisik serta psikis. Menurutnya, peristiwa keji tersebut sebagai bentuk upaya pembungkaman dan teror terhadap segala tindakan aktivisme. Mereka menduga penyiraman air keras terhadap Andrie bukan tindakan yang terjadi secara "kebetulan dan begitu saja", dan menilai itu dilakukan dengan sebuah perencanaan matang dan terstruktur. "Tindakan kekerasan berupa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak bisa sama sekali hanya dianggap sebagai kekerasan dan intimidasi biasa yang terfokus pada satu hal," ucapnya. Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menuturkan setidaknya

20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja jika memaksimalkan produksi dalam negeri. "Harusnya bisa menyerap 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah," singgung Said. Said menjelaskan dampak mengerikan jika kebijakan impor terus berlanjut, yakni apabila pesanan pabrik berkurang, maka pekerja kontrak menjadi pertama yang akan diputus masa kerjanya. "Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ada mobil impor dari India tadi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru," pungkasnya.(cnni/js)

lima alasan peradilan menjadi sesat jika kasus Andrie dibawa ke ranah peradilan militer. Pertama, tertutup dan tidak transparan. Herdiansyah kritik terhadap peradilan militer sudah ada sejak dulu karena berlangsung tertutup dan tidak transparan. Meskipun peradilan militer di bawah atap Mahkamah Agung (MA), kata dia, prosesnya sulit diakses publik bahkan korban, sehingga meningkatkan tuntutan agar anggota TNI aktif "wajib" diadili di peradilan umum. Kedua, mempertaruhkan daulat sipil dan demokratisasi. Dalam praktik demokrasi di belahan bumi manapun, militer harus tunduk pada daulat sipil. Herdiansyah mengingatkan rumus yang selalu berlaku adalah militer tidak akan pernah kompatibel dengan demokrasi. (cnni/js)

Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp100 T

Dari Halaman 1

biayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75 persen year-on-year (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp100,69 triliun," ujar Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisiner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4). Sementara itu, rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau indikator kredit macet fintech peer to peer lending (P2P) tercatat sebesar 4,54 persen.

"Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54 persen," tambahna. Selain pinjol, OJK juga mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pergadaian. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78 persen secara tahunan per Februari 2026. "Sementara itu, pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh sebesar 61,78 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp152,40 triliun dengan tingkat

risiko kredit yang terjaga," terang Agusman. Kemudian, Agusman menjelaskan pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar Rp126 triliun. Angka tersebut mencapai 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan. "Pembiayaan terbesar di industri pergadaian ini disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp126 triliun atau 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan oleh industri pergadaian," pungkasnya.(cnni/js)

Gunung Sorik Marapi Madina Naik ke Level

Dari Halaman 1

Berdasarkan laporan khusus Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 629.Lap/GL 03/BGL/2028 tanggal 3 April 2020 tentang Kenaikan Tingkat Aktivitas Gunung Api Sorik Marapi, bahwa telah terjadi peningkatan intensitas kegempaan yang tinggi sejak 2 April sampai 3 April 2026 pukul 18.00 WIB. Terkait dengan adanya peningkatan kegempaan tersebut, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi menaikkan tingkat aktivitas Gunung Sorik Marapi

dari Level I (Normal) menjadi Level (Waspada) terhitung mulai 3 April 2026 pukul 21.00 WIB. "Untuk mengantisipasi terjadinya bencana geologi dari Gunung Sorik Marapi bersama ini disampaikan bahwa jalur pendakian Gunung Sorik Marapi untuk sementara ditutup terhitung mulai tanggal 4 April 2026 sampai batas waktu yang tidak ditentukan," tulis unggahan tersebut. Pembukaan jalur pendakian akan dilakukan setelah aktivitas Gunung Sorik Marapi kembali normal (level 1) berdasarkan hasil pengamatan otoritas terkait. Karakter erupsi Gunung Sorik Marapi berupa erupsi freatik, erupsi abu, dan semburan lumpur yang berdasarkan sejarahnya pernah terjadi pada

tahun 1830, 1879, 1892, 1893, 1917, 1970, 1986, dan 1987. Titik erupsi tidak hanya terjadi di kawah utama atau puncak tapi juga di sekitarnya seperti di Kawah Sibangor Tonga dan Sibangor Julu. Pada 2 April 2026 terjadi peningkatan Gempa Vulkanik Dalam (VA) yang signifikan. Pada saat itu terekam 115 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA), 4 kali Gempa Terasa skala II IV MMI, dan 11 kali Gempa Tektonik Jauh. Pada 3 April 2026 intensitas kegempaan masih tinggi. Hingga pukul 18.00 WIB terekam 49 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA), 3 kali Gempa Tektonik Lokal, 1 kali Gempa Terasa skala IV MMI, dan 4 kali Gempa Tektonik Jauh. (cnni/js)

Nama SBY dan JK Ikut Terseret

Dari Halaman 1

Badan Hukum pada 31 Desember yang tidak digubris. "Benar bahwa semalam kami membuat laporan di Polda Metro Jaya, sebagai tindak lanjut somasi kami tertanggal 31 Desember 2025 yang tidak diindahkan," kata anggota Badan Hukum Partai Demokrat, Muhajir saat dihubungi, Selasa 6 Januari 2026 lalu. Laporan itu tercatat lewat LP bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026 pukul 23.16 WIB. Empat akun media sosial yang dimaksud

yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun Tik Tok @sudirowibudhismmp. Dari lima akun medsos yang disomasi, hanya akun YouTube Zulfan Lindan yang tak dilaporkan. Muhajir tak mengungkap dengan tegas alasan akun Zulfan Lindan batal dilaporkan. Sedangkan satu akun, Kajian Online, meski telah menyatakan maaf tetap dilaporkan karena dinilai telah melewati batas waktu somasi 3x24 jam. "Sehingga, kami tetap masukkan akun tersebut, salah satu terlapornya begitu. Akun Kajian Online," kata Muhajir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi

Hermanto mengatakan kasus tersebut masih diselidiki Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut juga berujung permintaan maaf salah satu terlapor. Akun YouTube dengan nama Kajian Online itu mengunggah video permintaan maaf pada Senin (5/1). "Dalam Video ini Kajian online juga ingin Mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak SBY dan Demokrat, kami juga berterima kasih atas waktu yang sudah di luangkan Rekan-rekan untuk berdiskusi bersama kami, atas sejumlah konten yang perlu diperbaiki, dan direvisi," demikian keterangan dalam video tersebut. (cnni/js)

Kemenag Telah Bekukan Ijin Alsaf Tour

Dari Halaman 1

jemaah umroh yang menjadi korban Alsaf Tour atau PT Safira Makkah Madinah Wisata. Kantor perusahaan ini awalnya beralamat di Jalan Dusun Jogja, Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang ternyata telah tutup. Lalu kantor travel ini diketahui telah beberapa kali pindah alamat, mulai dari Beringin, Lubuk Pakam, Medan Denai, Jalan Brigjen Katamso Medan hingga saat ini beralamat di Jalan Harapan Pasi Medan. Dalam laporan di Polda Sumut, para korban mengalami kerugian hingga Rp1,4 miliar. Bahkan akibat banyaknya korban penipuan Alsaf Tour, sejumlah pengacara membuka posko pengaduan. "Terkait (penipuan) ini kami dari Law Firm Pelita Konstitusi membuka posko pengaduan mulai hari ini agar dapat menghimpun para korban yang tersebar baik itu di Pulau Sumatera dan Jawa," kata Dongan N Siagian, SH didampingi Haris Dermawan, SH, MH, Bayu Subronto, SH dan Satria Adiguna, SH pada 9 Oktober 2025 lalu. Di posko ini tercatat telah menampung 19 korban. Mereka juga telah mendesak aparat kepolisian bertindak cepat agar tidak lagi muncul korban-korban baru. "Kita juga sudah membuat laporan resmi ke Polrestabes Medan dan memblokir izin Travel Umroh Alsaf Tour ke Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Namun hingga saat ini Travel Umroh Al-

saf Tour masih melakukan aktifitas promosi dengan menawarkan perjalanan paket umroh sampai saat ini. Kami menduga ada oknum-oknum di Kanwil Kemenag Sumatera Utara yang membekingi Travel nakal ini," ungkap Dongan saat itu. Sementara seorang sumber di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara yang telah dikonfirmasi pada Selasa (31/3/2026) mengakui kalau sampai saat ini ijin PT Safira Makkah Madinah Wisata dinonaktifkan dan diblokir. Alasannya karena banyaknya korban travel ini. "Sejak tahun 2025 buka tutup pak (permasalahan diselesaikan dan mengulangi lagi sempat beberapa kali sampai akhir 2025 hingga hari ini belum bisa menyelesaikan masalahnya kami sudah memanggil dan menjatuhkan sanksi status PPIU tidak aktif dan diblokir dan sudah di laporkan korban jemaah kepolisian," jawab sumber melalui pesan WA. Diketahui pemilik perusahaan PT Safira Makkah Madinah Wisata adalah Andi Suwardani Harahap, yang sempat dikenal sebagai salah satu caleg PPP di Padang Lawas Utara (Paluta). Ia bahkan sempat mengajukan diri menjadi Ketua PPP Paluta. Ia juga sempat menjadi Ketua Alwashliyah Kabupaten Paluta periode 2021-2026. Namun di tahun 2023, ia diberhentikan menyusul banyaknya pengaduan penipuan dari warga Alwashliyah. "Banyak disini korbannya bang, mulai dari Paluta hingga Madina, mereka juga dijanjikan berangkat umroh namun tak pernah jadi," kata seorang sumber yang pernah dekat dengan Andi. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan Andi dan keluarga saat ini. "Sudah 3

tahun gak pernah nampak disini (Paluta)," katanya lagi. Bahkan adik Andi yang pernah mencalonkan diri menjadi kepala desa juga dikabarkan menghilang. Ia mendengar desas desus kabarnya Andi telah tinggal di Kairo, Mesir. "Begitu kabar beredar disini bang", tegasnya. Dengan begitu banyaknya korban penipuan Alsaf Tour ini, Edrin mendesak Kementerian Agama Sumatera Utara untuk proaktif bekerjasama dengan pihak kepolisian mengejar pertanggungjawaban pemilik PT Safira Makkah Madinah Wisata. "Dugaan saya korbannya sudah mencapai ribuan orang, banyak yang tidak melapor ke polisi karena tinggalnya jauh di kampung-kampung Paluta, Palas, Tapsel, dan Madina bahkan dari Riau," kata Edrin. Karena itu Kemenag Sumut tidak boleh lepas tangan dan harus juga mendorong kepolisian menyelesaikan masalah ummat ini. Dugaan adanya 'main mata' antara oknum Kemenag Sumut dengan pihak travel diduga menyebabkan perusahaan ini tetap bisa berpromosi di media sosial. "Hingga saat ini mereka masih promosi di Instagram dan tiktok mencari calon-calon jemaah baru," ujarnya lagi. Edrin juga meminta Polda Sumatera Utara segera memblokir rekening PT Safira Makkah Madinah Wisata, agar tidak ada korban baru. "Dengan banyaknya korban dan laporan yang masuk ke polisi, harusnya Polda Sumut bisa bergerak cepat karena ini akan menjadi prestasi bagi jajaran kepolisian. Ribuan orang akan mengapresiasinya," tutup Edrin.(A-011)

Serangan Udara AS

Dari Halaman 1

dalam peran intelijen dan kontra-spionase, sambil meniti karier di aparat keamanan Iran. Sebelum pengangkatannya, Khademi memimpin Organisasi Perlindungan Intelijen Garda Revolusi, yang bertugas melakukan pengawasan internal dan kontra-intelijen, dan memegang peran senior di Kementerian Pertahanan Iran. Organisasi intelijen IRGC sendiri merupakan salah satu badan keamanan Iran yang paling kuat, dengan peran sentral dalam pengawasan domestik untuk melawan pengaruh asing. Organisasi ini sering beroperasi paralel dengan kementerian intelijen sipil. Pada 2025 lalu, serangan Israel juga telah menewaskan kepala intelijen IRGC Iran Mohammad Kazemi. Selain Kazemi, serangan tersebut juga menewaskan dua perwira tinggi intelijen IRGC lainnya. "Tiga jenderal intelijen yakni Mohammed Kazemi, Hassan Mohaghegh, dan Mohseb Bagheri dibunuh dan gugur sebagai martir," demikian pernyataan IRGC yang dikutip AFP. Kematian petinggi intelijen IRGC itu juga diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam wawancaranya dengan media Amerika Serikat Fox News.(cnni/js)

KPK Periksa

(ANUBI), Eko Martino Wafa Afizputro. "Penyidik meminta keterangan para saksi seputar pengisian kuota dan perolehan illegal gain atau keuntungan yang diduga tidak sah dari kuota tambahan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (6/4). Budi mengatakan, dua orang saksi lainnya yaitu Komisaris PT Gema Shafa Marwa Tours, Ulfah Izzati dan Manager Divisi Umrah dan Haji PT Abdi Ummat Wisata, Kurniawan Chandra Permata mengonfirmasi tidak bisa menghadiri pemeriksaan. (cnni/js)



Buruh Selalu Jadi Korban

Dari Halaman 1

Peringatan ini tidak boleh dianggap angin lalu. Sebab di negeri ini, setiap kali krisis datang, selalu ada pola yang berulang: buruh dijadikan korban pertama. Ketika dunia bergejolak, pemerintah biasanya bicara tentang stabilitas, pertumbuhan, dan ketahanan ekonomi. Pengusaha bicara tentang efisiensi dan penyesuaian pasar. Tetapi di ujung seluruh istilah yang terdengar teknokratis itu, ada manusia biasa yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan kehilangan kepastian hidup. Di Indonesia, PHK bukan sekadar angka statistik. Ia adalah pintu masuk menuju kecemasan sosial. Ia berarti uang sekolah anak terancam. Cicilan rumah tersendat. Dapur keluarga mulai menghitng beras per kilogram, bukan lagi per karung. Dan yang paling menyakitkan, PHK sering kali datang bukan karena pekerja gagal bekerja, tetapi karena negara gagal melindungi mereka dari dampak kebijakan dan gejolak global. Kita harus jujur mengatakan ini: buruh Indonesia terlalu sering dijadikan bantalan krisis. Setiap kali harga energi naik, pasar global terguncang, atau biaya produksi melonjak, solusi paling cepat selalu sama potong pekerja. Tidak pernah ada kesan bahwa buruh adalah aset yang harus dipertahankan. Mereka lebih sering diperlakukan sebagai beban yang boleh dibuang saat keadaan memburuk. Inilah cacat paling serius dari cara kita membangun ekonomi. Kita bangga menyebut diri sebagai negara besar dengan bonus demografi, tenaga kerja melimpah, dan ambisi menjadi pusat manufaktur regional. Tetapi dalam praktiknya, kita justru membiarkan tenaga kerja kita hidup dalam ketidakpastian permanen. Sedikit saja biaya produksi naik, yang pertama kali dipangkas adalah manusia. Lebih ironis lagi, ancaman PHK kali ini datang bersamaan dengan persoalan yang seharusnya bisa dicegah: impor. Jika benar pengadaan 160 ribu mobil pikap untuk program nasional lebih banyak dipenuhi dari luar negeri, maka itu bukan sekadar kebijakan teknis. Itu adalah tamparan politik terhadap industri nasional. Negara seperti sedang berkata kepada pabrik-pabrik dalam negeri: "Kami ingin lapangan kerja, tapi bukan dari kalian." Padahal, setiap pesanan besar pemerintah semestinya menjadi alat untuk menumbuhkan industri domestik. Dari satu unit kendaraan yang diproduksi di dalam negeri, ada rantai ekonomi panjang yang bergerak: pabrik perakitan, industri komponen, logistik, distribusi, jasa servis, hingga pekerja informal yang hidup di sekitar kawasan industri. Ketika order sebesar itu dialihkan ke impor, yang hilang bukan cuma angka tenaga kerja. Yang dirampas adalah kesempatan bangsa ini berdiri di atas kaki industrinya sendiri. Ini bukan semata soal nasionalisme ekonomi. Ini soal akal sehat pembangunan. Bagaimana mungkin negara berbicara tentang penciptaan lapangan kerja, tetapi pada saat yang sama justru membuka keran kebijakan yang berpotensi mengeringkan serapan kerja? Lebih jauh lagi, ancaman PHK tidak pernah berhenti di gerbang pabrik. Ia menjalar ke seluruh tubuh ekonomi nasional. Buruh yang kehilangan pekerjaan akan mengurangi belanja. Konsumsi rumah tangga melemah. Warung sepi. Pedagang kecil terpukul. Cicilan macet. Daya beli jatuh. Dan ketika daya beli runtuh, ekonomi nasional sesungguhnya sedang kehilangan salah satu tiang penyangganya yang paling utama. Membiarkan PHK meluas sama saja dengan menanam bom waktu sosial. Jangan salah: rakyat bisa menahan lapar lebih lama daripada pemerintah menahan kritik. Tetapi ketika rasa tidak aman menyebar luas, kemarahan sosial tinggal menunggu momentum. Negara harus berhenti memandang PHK sebagai "konsekuensi biasa" dari dinamika pasar. Tidak. PHK massal adalah kegagalan kebijakan. Ia menunjukkan bahwa negara terlalu lemah mengantisipasi guncangan global, terlalu lunak terhadap kepentingan impor, dan terlalu lambat membangun perlindungan tenaga kerja yang sungguh-sungguh. Jika pemerintah serius ingin mencegah badai ini, maka keberpihakan tidak boleh lagi berhenti pada pidato dan slogan. Industri padat karya harus dilindungi dari tekanan biaya energi. Belanja negara harus diwajibkan memihak produksi domestik. Insentif fiskal harus diarahkan untuk mempertahankan tenaga kerja, bukan hanya menjaga kenyamanan investor. Dan yang paling penting: negara harus berdiri di sisi buruh, bukan baru datang setelah pabrik-pabrik sepi dan orang-orang kehilangan pekerjaan. Kita terlalu lama hidup dalam model pembangunan yang memuja investasi, tetapi pelit pada perlindungan pekerja. Kita terlalu sering merayakan angka pertumbuhan, sambil menutup mata terhadap rapuhnya hidup mereka yang sesungguhnya menggerakkan ekonomi. Jika badai PHK benar-benar datang, kita tidak bisa lagi pura-pura terkejut. Sebab persoalannya bukan hanya perang di luar negeri, bukan hanya harga energi, dan bukan hanya impor. Persoalan utamanya adalah ini: Indonesia masih terlalu mudah mengorbankan buruh demi menyelamatkan semuanya kecuali buruh itu sendiri.